

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Pres, Pamulang.
- Budiarjo, Miriam, 2009, *Dasar-Dasar Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- , 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- DKKP RI, 2015, *Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Dunia*, CV. Net Communication, Jakarta.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Huda, Nurul, 2018, *Hukum Politik dan Pemilu Di Indonesia*, Fokus Media Bandung.
- Indartini, Mintarti dkk, 2019, *Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Daerah*, Taujih, Solo.
- Kurnia Rizkiyansya, Ferry, 2007, *Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi*, IDEA Publishing, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Nasution, Adnan Buyung, 2007, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme; Tata Negara*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta.
- Perdana, Aditya dkk, 2019, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta.
- Prihatmoko, Joko J, 2003, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, LP21, Semarang.

Saebani, Beni Ahmad, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Soemantri M, Sri, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, Remaja Rosdakarya, Jakarta.

Sunharizal, 2009, *PEMILUKADA Regulasi, Dinamika Dan Konsep Mendatang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tim Fakultas Hukum, 2022, *Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, Universitas Merdeka Pasuruan.

Triwulan, Titik, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pecalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

### **Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008.

### **Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **Jurnal**

Arif Sugitanata dkk, Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia Antara Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi, 2021, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 2, No 1, Juni 2021.

Diah Ayu Pratiwi, Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia Melahirkan korupsi Politik, 2018, *Jurnal Trias Politica*, Vol. 2, No. 1, April 2018.

Elita Tambupolon dkk, Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 2020, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 1 No 1, Juni 2020.

Muhammad Revan Fauzan Makarim dan Koirul Fahmi, Permasalahan dan Dampak Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Sistem Politik, 2022, *Journal of Social and Policy Issues*, Vol. 2, No 2, April 2022.

Hernandi Afandi, Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi Kajian Pemilu Serentak 2019, 2019, *Jurnal Hukum Positum*, Vol.25, No 1, April 2019.

### **Skripsi**

Ana Wijayanti, Pilihan Pemilih Terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Pati Dalam Pemilu Legislatif 2009 (Di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati), 2009, *Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*.

Sri Emut Ratnasari, Pengaruh Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Pada Kualifikasi Calon Legislatif, 2019, *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.

Ulfa Gunawan, Dampak Penggunaan Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pileg 2014 Di Kabupaten Bantul, 2016, *Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

Yusuf Agung Purnama, Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Rakyat, 2021, *Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.

## Website

Bawaslu, *Update Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Per 20 Mei 2019*, [https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan\\_pemilu/update-data\\_pelanggaran-pemilu-tahun-2019-20-mei-2019-0](https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan_pemilu/update-data_pelanggaran-pemilu-tahun-2019-20-mei-2019-0), diakses tanggal 1 Desember 2022, pukul 15.00.

DPR RI, *Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, <https://www.dpr.go.id/jdih/indeks/id/206>, 2003, diakses tanggal 2 November 2022, pukul 09.00.

Jaringan Demokrasi Indonesia, *Data Pelanggaran Pemilu 2019*, [https://jadinet.org/data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-bawaslu\\_go-id/](https://jadinet.org/data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-bawaslu_go-id/), 2019, diakses tanggal 11 Desember 2022, pukul 15.35.

Komisi Pemilihan Umum, *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum*, <https://jdih.kpu.go.id/data/datakepku/SK%20No.%20Tahun%2018%220OK>, 2018, diakses tanggal 2 November 2022, pukul 09.00.

Simkada, *Mengenal Lebih Jauh Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*, <https://www.simkada.net/blog/mengenal-lebih-jauh-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia>, diakses tanggal 17 Desember 2022, pukul 20.16.

Stefani Wijaya, *PKS: Sistem Proporsional Terbuka Berdampak Positif bagi Demokrasi*, <https://www.google.com/amp/s/www.beritasatu/news/10164999/pks-sistem-proporsional-terbuka-berdampak-positif-bagi-demokrasi/amp>, diakses tanggal 25 Februari 2023, pukul 08.00.